

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Disadari bahwa setiap potensi kepariwisataan berada di daerah. Potensi kepariwisataan ini dapat menjadi obyek wisata andalan, yang mampu berkembang dan bertahan serta terpelihara dengan baik, tentu saja semua ini sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya. Hal itu mesti ditindak lanjuti dengan motivasi yang tinggi dari pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan sektor pariwisata, mengapa demikian itu disebabkan oleh potensi pariwisata yang sangat melimpah dan memiliki nilai potensial yang sangat tinggi dan akan menjadi percuma bila tidak adanya tindak lanjut dan respon yang positif dari pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Barat. Sebagai status para perencana strategis dalam pemberdayaan sektor pariwisata pemerintah memegang peranan yang sangat vital, hal ini dikarenakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Barat sebagai perencana wajib dan sudah merupakan suatu keharusan bahwa dalam membuat suatu perencanaan harus memiliki suatu motivasi dan keyakinan bahwa perencanaan yang dibuat dan disetujui harus terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, sehingga memantapkan langkah kedepannya dalam

Hal di atas akan menjadi motivasi bagi para pelaksana perencanaan strategis bahwa perencanaan yang telah disusun dan disepakati akan berjalan dengan sukses dan terorganisir dengan rapi dengan memfokuskan suatu perubahan yang signifikan dan memiliki suatu nilai yang bermanfaat bagi semua lapisan dimana yang perlu ditekankan adalah para stakeholder kunci. Mengapa demikian karena dalam proses pemberdayaan sektor pariwisata melibatkan banyak individu yang memiliki suatu kepentingan dan kebutuhan dalam dunia kepariwisataan dimana keberadaan para individu tersebut memegang peranan penting dalam menunjang apa yang sudah menjadi hasil dari perencanaan strategis yang telah dihasilkan, dengan maksud dan tujuan bahwa apa yang sudah dihasilkan dan disepakati akan berjalan baik dengan mempertimbangkan segala aspek yang akan dihadapi dalam proses menjalankan proses perencanaan strategis kedepannya.

Dengan demikian pemerintah daerah seyogyanya memiliki dan meningkatkan keaktifan baik itu dalam membuat dan melaksanakan, karena pemerintah daerah memiliki suatu kekuatan pada daerah untuk mengembangkan dan memberdayakan apa yang menjadi potensi pada daerahnya, dalam hal ini sektor pariwisata yang merupakan aset daerah. Dengan tidak melupakan bahwa disekitar pemerintah daerah memiliki unsur pendukung meliputi masyarakat, pihak swasta, dan pihak lainnya dimana disini dibutuhkan kerjasama yang kuat dan terus menerus dengan satu tujuan

... ..

pendapatan daerah dengan merefleksikan kepada kesejahteraan hidup masyarakat.

Hal di atas membuktikan bahwa dalam proses perencanaan strategis baik itu pada saat membuat dan melaksanakan dibutuhkan kerjasama dan rasa keterikatan antar para perencana dan stakeholder dengan memiliki satu pandangan yang sama dan kuat dalam mensukseskan proses perencanaan strategis yang merupakan perwujudan akan rasa keseriusan dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dan menjadi landasan penentu dalam strategi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah sebagai hal yang pantas dan patut diperjuangkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Hal tersebut diperkuat oleh Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sistematis terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis (terpusat) dengan kecenderungan kearah pemberdayaan daerah, telah membawa dampak yang besar dalam pembelajaran daerah untuk lebih mandiri dalam hal perencanaan, pengawasan hingga pengaturan pembiayaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Konsekuensi logis yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan otonomi daerah ini membawa daerah harus mampu untuk menggali segala potensi yang terkandung didalamnya, baik itu potensi sumber daya manusia,

mengupayakan kehidupan sosial, politik, dan keamanan masyarakat dalam kondisi yang stabil demi kelancaran penyelenggaraan program yang telah direncanakan. Demikian pula dalam hal pembiayaan terhadap program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah sedapat mungkin berasal dari penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun hasil perimbangan pemanfaatan potensi daerah.

Untuk memenuhi semua tuntutan ini, maka upaya pemerintah daerah untuk mendatangkan devisa dalam era pembangunan ini adalah dengan menggalakkan sektor pariwisata. Dalam era otonomi daerah, sektor pariwisata dapat menjadi sektor andalan dan penggerak roda perekonomian daerah.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan yang tidak hanya semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi kegiatan sektor lain yang berkaitan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Selain dampak positif yang diperoleh dari upaya pemberdayaan sektor pariwisata, tidak sedikit pula dampak negatif yang timbul yaitu, terjadinya degradasi nilai-nilai sosial budaya dan moral, degradasi kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan pariwisata yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ... ..

1. Pemberdayaan pariwisata harus dilakukan didasarkan atas hasil musyawarah dan dengan kemufakatan seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat).
2. Pemberdayaan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik material, spiritual, kultural, maupun intelektual.
3. pemberdayaan pariwisata harus didasarkan atas prinsip-prinsip lingkungan dan ekologi yang sehat, peka terhadap atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi keagamaan yang dianut penduduk setempat, serta tidak menempatkan penduduk setempat pada posisi yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia.
4. Pemberdayaan pariwisata hendaknya dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui ambang batas daya dukung lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas hubungan manusia yang sehat berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Keempat kriteria di atas dapat berjalan dengan baik tergantung dari bagaimana pemerintah dan instansi terkait mampu menjalankan strategi yang telah dibuat dan diproses agar mampu berjalan dengan baik.

Sesuai dengan tujuan yang dicapai bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik materi maupun spiritual. Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan dimaksud maka

diterangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sebagai berikut :

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.<sup>2</sup>

Memperhatikan persyaratan dan Garis-garis Besar Haluan Negara dimaksud, maka pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu Bangsa Indonesia menghendaki adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama umat manusia serta manusia dengan lingkungannya. Dengan makin meningkatnya dan meluasnya pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya akan semakin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan akan menjadi semakin kecil.

Hal ini akan lebih memperbesar kesadaran rakyat mengenai arti dan manfaat pembangunan pariwisata, sehingga memperkuat tekad rakyat untuk melanjutkan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya.

Khusus dalam pembangunan bidang ekonomi maka sub-sektor pariwisata adalah salah satu bidang yang dapat meningkatkan penerimaan devisa negara dan memperluas kesempatan kerja serta kesempatan berusaha,

---

hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Atas dasar pengertian tersebut diatas maka sub sektor pariwisata mempunyai peranan yang cukup penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan sektor pariwisata sekarang ini secara nasional menempati posisi yang paling penting dan strategis ditandai dengan makin tingginya kegiatan memiliki nilai kepariwisataan sebagai refleksi dari adanya dukungan pemerintah dengan berbagai program yang dapat mendorong kegiatan usaha pariwisata. Sektor pariwisata memiliki sarana sebagai motor penggerak terhadap pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kedepan dapat menggantikan peran minyak dan gas bumi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional tersebut Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan sektor pariwisata sebagai prioritas kedua setelah pertanian dalam arti luas. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 1989 yang isinya antara lain menetapkan 15 kawasan pembangunan pariwisata di NTB yaitu 9 (sembilan) kawasan di Pulau Lombok dan 6 (enam) kawasan di Pulau Sumbawa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Daerah Propinsi*

Kawasan pariwisata tersebut pada umumnya berada di Kabupaten Lombok Barat, sehingga pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat beralasan menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan kedua setelah pertanian, hal ini ditandai meningkatnya pertumbuhan usaha pariwisata dan arus kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat khususnya ke Kabupaten Lombok Barat.

Dari penjelasan di atas, penulis mengemukakan beberapa alasan pemilihan judul, antara lain :

1. Dengan dilaksanakannya pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, berkembangnya industri kecil dan meningkatnya pendapatan daerah.
2. Pembangunan sektor pariwisata dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan serta melibatkan sektor terkait lainnya, masyarakat, pelaku pariwisata dan komponen terkait lainnya, maka diperlukan strategi dan perencanaan yang baik dalam upaya pemberdayaan sektor pariwisata, sehingga tercipta pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh masyarakat serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara.
3. Penulis berkeinginan untuk memperdalam pengetahuan tentang kepariwisataan, khususnya pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Di samping itu pula potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain yang ada di seperti kawasan Senggigi, Suranadi, Gili Gede dan kawasan Gunung Rinjani.

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengambil judul skripsi yaitu “Strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Pemberdayaan Sektor Pariwisata Tahun 2005/2006”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu agar penelitian dapat berlangsung pada sasaran obyek yang telah ditentukan. Tujuan utama dari penelitian adalah memecahkan suatu masalah. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya<sup>4</sup>.

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukan ketika tidak puas melihatnya saja melainkan kita ingin melihat lebih dalam. Hal ini dapat dilihat dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan hidup, seharusnya dengan melihat potensi yang ada pariwisata bisa menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Lombok Barat sehingga mampu meningkatkan standar kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

---

<sup>4</sup>.....

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang di ambil adalah : “Bagaimanakah strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberdayakan sektor pariwisata?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Mengetahui perkembangan pembangunan sektor budaya dan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengetahui strategi apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pemberdayaan sektor pariwisata sehingga mampu menjadi lahan basah yang dapat mensejahterakan masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan daerah.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.
3. Membantu mewujudkan pariwisata yang bisa ikut ambil bagian dalam

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian<sup>5</sup>.

Untuk memperoleh kesatuan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan batasan pengertian, sebagai berikut :

### **1. Strategi**

Sebelum mendefinisikan apa itu strategi maka hal yang perlu diketahui dan diperhatikan adalah bagaimana strategi itu dihasilkan melalui apa yang dinamakan manajemen strategis.

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian manajemen strategis :

#### **1.1 Henry M. Boetinger<sup>6</sup>**

Berpendapat bahwa manajemen itu suatu seni yang membutuhkan tiga unsur yaitu :

- a. Pandangan seniman
- b. Pengetahuan dan teknis
- c. Teknik dan komunikasi yang berhasil

---

<sup>5</sup> Sofian Effendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ESD, Jakarta, 1989, hal.37.

Dalam hal ini manajemen merupakan suatu seni, maka manajemen memerlukan tiga unsure tersebut. Oleh karena itu ketrampilan manajemen, ketrampilan seni juga dikembangkan melalui training. Ketrampilan manajemen juga dikembangkan dengan cara yang sama.

### 1.2 Luther Gulick<sup>7</sup>

Mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerjasama itu berguna bagi kemanusiaan. Manajemen memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang pengetahuan karena telah dipelajari bertahun-tahun dan telah diatur mnejadi serangkaian teori-teori.

### 1.3 L.H. Walson dan Oey Liang Lie<sup>8</sup>

Manajemen dinyatakan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki azas-azas seperti ilmu lainnya yang disebut "azas manajemen". Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen.

Atasan mempengaruhi bawahan dengan wibawa, charisma, atau seni memimpin orang. Dengan ilmu manajemen seorang pemimpin mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik dan menentukan sikap, mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara cepat dan tepat.

#### 1.4 James A.F. Stoner<sup>9</sup>

Mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan pengkoordinasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pokok-pikiran sebagai berikut :

- a. Proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan suatu manajemen yang didefinisikan sebagai suatu proses. Karena semua pemimpin memiliki kemampuan, keahlian, ketrampilan yang terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- b. Perencanaan, menunjukkan bahwa para pemimpin memikirkan tujuan dan kegiatan sebelum melakukan kegiatan pada suatu cara, rencana dan logika.
- c. Pengorganisasian, berarti para pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi.

Manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi dalam upaya pencapaian tujuan tertentu, tapi apapun tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, manajemen strategis adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tersebut.

Manajemen strategis memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

#### 1.1 Manfaat Finansial.

Manfaat paling utama adalah tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan meskipun tidak secara otomatis dengan menerapkan manajemen strategis.

#### 1.2 Manfaat Non-Finansial.

- a. Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- b. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
- c. Menggambarkan *framework* untuk meningkatkan koordinasi untuk kontrol terhadap aktifitas.
- d. Meminimumkan pengaruh dari perubahan.
- e. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang

- f. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang.
- g. Memungkinkan penggunaan sumber daya dan waktu yang lebih sedikit.
- h. Membantu perilaku yang lebih terintegrasi dan individu untuk mencapai *total effort*.

Mengingat perumusan langkah strategis penelitian ini menggunakan model manajemen strategis, maka dalam menganalisa digunakan urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut. Dalam hal ini dibagi dalam beberapa tahap dari manajemen strategis sebagai berikut :

#### 1.1 Identifikasi mandat dan misi organisasi

Mandat merupakan apa yang diharuskan dan diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya termasuk yang diharapkan dari masyarakat lokal sendiri. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. Mandat dari sisi inilah yang digunakan sebagai titik tolak dalam mengukur kinerja organisasi itu.

Langkah pertama dalam perencanaan strategis ini dimaksudkan untuk mempertegas kembali apa yang sebenarnya. Pengidentifikasi ini dilakukan dengan mengkomparasikan antara peraturan perundangan yang berlaku dengan pandangan *stakeholders* terkait

## 1.2 Analisis Lingkungan Strategis.

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan internalnya. Sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif dan mengkaitkan kedua lingkungan tersebut.

Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Pemahaman atas kedua kondisi lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) untuk merumuskan isu strategis pada tahapan analisis berikutnya.

- a. Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap :
  - a) Sumber data yang dimiliki (*input*) meliputi : SDM, dana, sarana atau fasilitas, struktur dan budaya organisasi.
  - b) Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input.
  - c) Kinerja (*output*) yang dicapai saat ini.
- b. Sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui :
  - a) Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik, sosial, teknologi, fisik, dan pendidikan.
  - b) Mengamati *stakeholder* luar yang berpengaruh secara *client, customers*, para pembuat kebijakan.
  - c) Mengamati *competitor* dan *collaborators* yang ada

### 1.3 Analisis Isu Strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan inti dari perencanaan strategis. Karena isu strategis merupakan pertanyaan, kebijakan mendasar yang harus ditemukan jawabannya dalam upaya mewujudkan mandat dan misi organisasi. Dalam mengidentifikasi isu strategis studi ini menggunakan pendekatan langsung (*the direct approach*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mempelajari visi dan misi.
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman.
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategisnya.

### 1.4 Analisis *Critical* Isu Strategis

Proses mengidentifikasi isu strategis merupakan proses yang cukup rumit, sehingga perlu dilakukan berbagai pengujian lebih lanjut terhadap isu-isu strategis yang lebih berhasil diidentifikasi. Karena bukan tidak mungkin isu itu tidak cukup strategis. Untuk itu diperlukan untuk alat ukur/tes untuk melihat seberapa strategis isu tersebut, sehingga terjaring isu-isu yang benar-benar strategis (*critical strategic issues*).

Pada dasarnya strategis merupakan garis besar (*out line*) respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi harus dimunculkan selaras dengan isu strategis yang

Dalam perumusan strategis ini dilakukan pendekatan 5 (lima) tahapan proses perumusan strategis sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- b. Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif tersebut.
- c. Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala.
- d. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam empat tahun ke depan.

## **2. Pemerintah Kabupaten**

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

2.1 Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah”, berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara.

2.2 Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tertentu

Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut :

- a. Istilah pemerintahan menunjukkan pada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas penting.
- b. Istilah pemerintah menunjukkan pada badan atau organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi tersebut.<sup>11</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut :

- a. Pemerintahan, dalam arti luas : segala sesuatu tugas kewenangan atau kekuasaan Negara yang kalau mengikuti pembidangan Montesquieu meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Pemerintah, dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan dalam bidang eksekutif saja.

Dalam tipologi Intervensi Pemerintah dalam *the laissez-faire society* (masyarakat bebas) menurut Adam Smith seoerti yang dikutip oleh Sri Mulyani, tugas pemerintah adalah :

- a. Melindungi masyarakat dari kekerasan dan invansi yang mungkin dilakukan oleh masyarakat lain (sebagai badan pertahanan).
- b. Melindungi individu dalam masyarakat dari ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh individu lain dari masyarakat tersebut (administrasi dan keadilan).

- c. Membangun sarana infrastruktur dan menyediakan barang dan jasa publik.<sup>12</sup>

Sedangkan fungsi dasar pemerintah menurut Anderson seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan infrastruktur
- b. Menyediakan barang dan jasa publik
- c. Menyelesaikan konflik-konflik antar kelompok
- d. Menumbuhkan dan memelihara kompetensi
- e. Menjaga kelestarian sumber daya
- f. Menjaga agar setiap warga Negara dapat memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang dibutuhkan
- g. Menjaga stabilitas ekonomi<sup>13</sup>

Dari berbagai perspektif tersebut di atas, terdapat banyak fungsi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun paling tidak diberbagai fungsi di atas dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) fungsi minimal yang dilakukan pemerintah, yaitu<sup>14</sup> :

- a. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Merupakan fungsi pemerintahan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun

---

<sup>12</sup> Owen E. Hughes. "Public Manajemen And Administration And Introduction", MartinPress, 1994,hal 88-119. Seperti Dikutip Sri Mulyani, "Peranan Pemerintah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik di Lingkungan Tingkat Setor Atas" Ilmu Pemerintahan, Fisiol UMY

pemerintah kabupaten/kota. Fungsi regulasi atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, juga lembaga departemen maupun non departemen.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan oleh masyarakat.

b. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan sebagainya.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik, hukum, ekonomi, dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah bisa memberdayakan masyarakat

karena upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat pemerintah itu sendiri.

c. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan fungsi esensial dari pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik oleh birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah. Fungsi pelayanan ini merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

- a) Menjamin keamanan Negara
- b) Memelihara ketertiban
- c) Menjamin penerapan keadilan
- d) Pekerjaan umum dan pelayanan
- e) Meningkatkan kesejahteraan sosial
- f) Menerapkan kebijakan ekonomi
- g) Memelihara sumber daya dan lingkungan

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peran pemerintah adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Negara, yang mempunyai peran tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tugas-tugas tersebut baik berupa penyediaan sarana dan

dan menjaga masyarakat. Sedangkan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

### 3. Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya, kekuatan, dan kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian

masyarakat yang memiliki pengetahuan, melakukan, menciptakan situasi

atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya, kekuatan, dan kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya, kemampuan, dan kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan, dan kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain.

Senada dengan pengertian ini Prijono dan Pranarka<sup>15</sup> menyatakan bahwa : pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua yaitu, *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang

---

<sup>15</sup> Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka (penyunting), 1996, “Pembedayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, dalam *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*”, oleh :  
Anwar Ghani, Sulistyani, Cemas Media, Yogyakarta, hal. 78

kita maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat, apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atas pergulatan kekuasaan. Sedangkan dalam konteks Indonesia, apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya.

Mengingat perbedaan latar belakang sosial, budaya, politik dan lingkungan, maka dalam mengadopsi teori tidak dapat dilakukan secara mutlak. Seperti halnya dalam mengadopsi teori pemberdayaan. Kesadaran tentang perbedaan konteks memberikan sinyal bahwa dalam adopsi teori hendaknya tidak sekedar mentransformasikan dari suatu konteks ke dalam konteks lain entah itu negara, budaya, politik maupun lingkungan.

Dalam hal ini perlu dilakukan adaptasi, yaitu proses transformasi teori dari suatu konteks ke dalam konteks lain secara selektif, yaitu mempertimbangkan perbedaan latar belakang. Dengan demikian proses transformasi disertai dengan penyesuaian penyesuaian keseluruhan

Sebagaimana telah disampaikan oleh Sumodiningrat di atas, bahwa dalam memahami *empowerment* antara konteks Barat dengan konteks Indonesia hendaknya berbeda. Dengan demikian dalam aplikasi konsep pemberdayaan ke dalam bentuk pendekatan teknis tidak mengalami hambatan sosial budaya, politik dan lingkungan. Oleh karenanya pemberdayaan dilakukan menjadi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Berkenan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winami mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.

Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu, pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Akar pemahaman yang diperoleh dari diskursus ini adalah :<sup>16</sup>

- a. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- b. Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Kata pemberdayaan mengesankan arti “tangguh atau kuat” menurut Rappoport, seperti yang dikutip oleh Endang Setyowati<sup>17</sup> adalah sebagai berikut, praktek yang berbasis pemberdayaan adalah suatu bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol-simbol yang mengkomoniskan kekuatan yang tangguh untuk merubah hal-hal yang terkandung dalam diri seseorang yang dianggap penting serta masyarakat sekitar.

Menurut Simon, pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang dapat dimulai dan dipertahankan hanya oleh agen dan subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri, sementara

---

<sup>16</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. “*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*”, *Gaya Media*, Yogyakarta, hal. 78.

<sup>17</sup> Endang Setyowati, 2003, hal.19.

wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat kita lihat dan pahami bahwa pariwisata adalah sangat berkaitan erat dengan semua orang. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata di suatu daerah, akan melahirkan daerah tersebut menjadi Daerah Tujuan Wisata atau DTW.

Kata pariwisata sendiri digunakan secara resmi di Indonesia sebagai pengganti kata turisme sejak tahun 1959, yaitu dalam Musyawarah Nasional Tourisme II di Tretes, Jawa Timur. Banyak ahli yang telah mendefinisikan pengertian pariwisata yang walaupun berbeda dalam perumusan namun memiliki esensi yang sama. Dalam kamus Oxford,<sup>18</sup> *tourism* didefinisikan sebagai : *the business activity connected with providing accomodation services and entertainment for people who are visiting a place for pleasure.*

Sementara itu dalam kamus ensiklopedi Indonesia, pariwisata atau *tourism* adalah dimaksudkan sebagai kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat atau kota lain atau negara lain dalam jangka waktu tertentu.<sup>19</sup> Tujuan perjalanan tersebut dapat bersifat pelancongan, bisnis, keperluan ilmiah, kegiatan keagamaan atau juga silaturahmi.

---

<sup>18</sup> Sally Wehmeier, "Oxford Advanced Learner's Dictionary", New York, Oxford University Press, 2000

<sup>19</sup> ... ..

Dengan demikian, hampir semua perjalanan ke daerah lain dapat digolongkan sebagai kegiatan pariwisata, kecuali bila perjalanan itu dilakukan untuk tujuan kerja atau mencari nafkah. Akan tetapi, perjalanan bisnis masih tetap digolongkan sebagai kegiatan pariwisata karena kebanyakan wisatawan bisnis hanya menggunakan waktu beberapa jam saja dalam setiap harinya untuk mengurus bisnisnya, sedangkan waktu selebihnya digunakan untuk bersenang-senang.

Searah dengan pengertian di atas, Ardika mendefinisikan pariwisata sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yaitu berkaitan dengan penggunaan waktu luang secara tepat dan benar untuk rekreasi.<sup>20</sup>

Dari pembatasan istilah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja, sangat ditentukan oleh strategi perencanaan dan pelaksanaan yang baik dengan melibatkan komponen yang terkait dan memanfaatkan potensi sesuai daya dukung yang ada.

## **F. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau

---

<sup>20</sup> I Wayan Ardika, *"Pariwisata Budaya Berkelanjutan-Refleksi dan Harapan di Tengah*

batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah :

#### 1. Strategi Pemerintah Kabupaten

Adalah langkah-langkah atau upaya-upaya konstruktif dan sistematis yang memuat garis kebijakan umum, kebijakan teknis dan operasional dalam mencapai tujuan program yang telah tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten sebagai suatu unit organisasi yang memiliki wewenang dan kekuasaanya memerintah disuatu kabupaten tertentu.<sup>21</sup> Adalah dengan memanfaatkan ssebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Strategi digunakan sebagai alat oleh organisasi untuk memaksimalkan kinerja dan menjaga nilai akuntabilitas serta menciptakan solusi dalam proses pembangunan ke arah yang lebih maju. Dengan strategi, organisasi akan berpikir kritis terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga ada upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan merumuskan langkah-langkah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

#### 2. Pemberdayaan Sektor Pariwisata

Adalah segala program dan kegiatan diarahkan untuk membangun sektor pariwisata yang mandiri dan kuat dalam memberikan kontribusi

bagi pembangunan daerah.<sup>22</sup> Dengan memberikan upaya untuk membangun daya pada sektor pariwisata yaitu, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sebagai sektor yang kuat dan mampu menjadi objek andalan dalam pembangunan dan pendapatan daerah.

### G. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Dari kondisi tersebut, definisi operasional dari penelitian ini adalah :

#### 1. Mengidentifikasi analisis SWOT :

- a. Analisis lingkungan internal (*kekuatan/strength* dan kelemahan/*weakness*) dilakukan terhadap :
  - a) Sumber data yang dimiliki (*input*) meliputi : SDM, dana, sarana atau fasilitas, struktur dan budaya organisasi.
  - b) Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input.
  - c) Kinerja (*output*) yang dicapai saat ini.
- b. Analisis lingkungan eksternal (*peluang/opportunities* dan ancaman/*threats*) dilakukan melalui :

- a) Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik, sosial, teknologi, fisik, dan pendidikan.
  - b) Mengamati *stakeholder* luar yang berpengaruh secara *client*, *customers*, para pembuat kebijakan.
  - c) Mengamati *competitor* dan *collaborators* yang ada.
2. Proses perumusan strategi dan Implementasi dari strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata :
- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
    - a) Promosi pariwisata daerah.
    - b) Pembinaan dan penyuluhan pariwisata.
    - c) Pengadaan bahan promosi pariwisata.
  - b. Program pengembangan destinasi pariwisata.
    - a) Pemeriksaan fisik dan administrasi izin usaha pariwisata.
    - b) Pengendalian dan penertiban usaha pariwisata.
    - c) *Event* budaya daerah.
    - d) Festival/lomba seni budaya daerah.
    - e) Festival Nusa Dua Bali.
    - f) Penataan obyek dan daya tarik wisata.
    - g) Forum komunikasi pokdarwis.
  - c. Program pengembangan kemitraan.
    - a) Pelayanan informasi dan kerjasama pemasaran dengan media massa.
    - b) Bintek pelaku pariwisata.

- c) Pertemuan berkala dengan pengusaha pariwisata.
- d) Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata.
- d. Program pengembangan perencanaan pariwisata.
  - a) Pendataan kunjungan wisata.
  - b) Pembinaan, pendataan dan monitoring usaha pariwisata.
  - c) Pembinaan, pendataan dan monitoring ODTW.
  - d) Pembinaan, pendataan dan monitoring seni budaya daerah.
  - e) Penyusunan profil pariwisata.
  - f) Penunjang ketatausahaan.
  - g) Perencanaan teknis kepariwisataan.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berpikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>23</sup>

Winarno Surachman berpendapat metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja yaitu dengan kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>24</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melikiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lombok Barat NTB yaitu mengambil studi kasus di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Alasan pemilihan lokasi adalah selain karena ingin mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pemberdayaan sektor pariwisata, juga karena Kabupaten Lombok Barat dianggap mampu mewakili Kabupaten/Kota lain di NTB dalam hal pemberdayaan pariwisata.

Hal itu dapat ditinjau dari letak geografis Kabupaten Lombok Barat yang terletak pada segi tiga emas daerah tujuan wisata di Indonesia, yaitu

---

<sup>24</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian", *Chelita Indonesia*, hal. 62

di sebelah barat adalah pulau Bali, di sebelah utara adalah Tanah Toraja, dan di sebelah timur adalah pulau Komodo. Di samping itu Kabupaten Lombok Barat sangat didukung oleh kekayaan alam serta keanekaragaman budaya sebagai aset wisata.

Berdasarkan studi UNDP (*United Nation Development Program*) bahwa di Propinsi NTB terdapat 15 kawasan pariwisata yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan ditindak lanjuti dengan ditetapkannya oleh Pemerintah Daerah NTB melalui Perda No.9 tahun 1989 bahwa terdapat 9 kawasan pariwisata di Pulau Lombok dan 6 kawasan di Pulau Sumbawa. Dari 9 kawasan pariwisata Pulau Lombok tersebut, terdapat 4 kawasan pariwisata (wisata alam) yang berada di Kabupaten Lombok Barat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan tehknik-tehknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Interview/wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat tehknik ini adalah menjelaskan sedetail detailnya pertanyaan yang diajukan

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam pencarian data, penelitian ini untuk mengetahui adanya rangsangan tertentu yang diinginkan dengan cara mengamati langsung.

4. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif maka yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer: data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan pariwisata.
- b. Data sekunder: data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai pariwisata.

5. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa data adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan model analisa kualitatif yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis

atas berbagai data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan, laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya.

Sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan deskriptif dipakai untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini berusaha menggambarkan strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pemberdayaan pariwisata daerah.

Mengenai penelitian yang bersifat kualitatif, Winarno Surahman menjelaskan sebagai berikut :

“Sifat dari bentuk penelitian deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.”<sup>25</sup>